

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, UNICEF menjalankan perannya dalam mengatasi masalah gizi remaja di Indonesia pada periode 2016-2020 melalui program Aksi Bergizi dalam tiga bentuk peran. Sebagai instrumen, UNICEF menyediakan riset berbasis bukti, menyusun modul, meningkatkan kapasitas pelaksana, serta melakukan uji coba program yang kemudian menjadi dasar penyusunan kebijakan. Sebagai arena, UNICEF memfasilitasi kolaborasi lintas sektor dengan mempertemukan kementerian, pemerintah daerah, akademisi, mitra pembangunan, dan remaja dalam pelaksanaan program. Sementara sebagai aktor, UNICEF secara mandiri menginisiasi agenda Aksi Bergizi, menggerakkan dukungan pendanaan dan kemitraan, serta mengadvokasi lahirnya SKB 4 Menteri Tahun 2022 sebagai landasan penguatan tata kelola gizi remaja di Indonesia. Ketiga peran tersebut saling melengkapi dalam mengisi kekosongan kebijakan gizi remaja sekaligus mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya Tujuan 2 (*Zero Hunger*) dan Tujuan 3 (*Good Health and Well-being*).

Penulis menyadari bahwa dalam proses analisis, batas antara peran UNICEF sebagai instrumen dan sebagai aktor tidak selalu tampak tegas, mengingat kedua peran tersebut sama-sama tercermin dari tindakan konkret UNICEF dalam memproduksi bukti, merancang model intervensi, hingga mendorong perubahan kebijakan sehingga penjelasan pada kedua peran ini cenderung memiliki kemiripan substansi. Di samping itu, Program Aksi Bergizi pada akhirnya menjadi bukti bahwa organisasi internasional dapat berperan sebagai penggerak perubahan dengan menghadirkan solusi yang kemudian diadopsi dan dilembagakan oleh pemerintah. Temuan ini menegaskan kembali relevansi kajian Hubungan Internasional dalam membaca dinamika aktor non-negara, di mana organisasi internasional seperti UNICEF tidak semata menjadi pelengkap kedaulatan negara, melainkan turut membentuk arah kebijakan domestik melalui norma, keahlian, dan jejaring yang dimilikinya. Dengan ini,

keberhasilan penanganan gizi remaja tidak hanya bergantung pada intervensi kesehatan, tetapi juga pada kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah, organisasi internasional, masyarakat, dan remaja untuk mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang lebih sehat dan berkualitas.

6.2 Saran

6.2.1. Saran Akademis

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang dapat menjadi pijakan bagi pengembangan kajian selanjutnya, antara lain:

1. Penelitian ini berfokus pada periode 2016-2020 sehingga belum mencakup dinamika pasca terbitnya SKB 4 Menteri Tahun 2022. Peneliti selanjutnya disarankan mengkaji tahap pelembagaan dan perluasan program pada periode berikutnya untuk menilai keberlanjutan peran organisasi internasional.
2. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa Aksi Bergizi menjadi salah satu landasan bagi lahirnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) di era Presiden Prabowo Subianto. Namun, karena program MBG berada di luar rentang waktu penelitian ini (2016-2020), keterkaitan tersebut tidak dibahas secara mendalam. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara khusus kesinambungan antara Aksi Bergizi dan Makan Bergizi Gratis.
3. Sebagai kajian Hubungan Internasional yang berfokus pada dimensi sosial-politik, pembahasan aspek kesehatan dan gizi secara teknis dalam penelitian ini bersifat terbatas. Peneliti dari rumpun kesehatan masyarakat, gizi, atau kedokteran disarankan untuk menelaah efektivitas Aksi Bergizi dari sudut pandang klinis sebagai pelengkap lintas disiplin.
4. Tingkat kerincian data tidak berhasil ditemukan penulis untuk kasus piloting di Kabupaten Klaten. Penulis tidak menemukan publikasi setingkat surat edaran bupati atau pemberitaan daerah yang secara spesifik mencantumkan nama-nama sekolah pilot

tersebut, sebagaimana yang tersedia untuk Lombok Barat. Nama-nama sekolah spesifik di Klaten yang banyak ditemukan pada pemberitaan daring maupun media sosial resmi Dinas Kesehatan setempat pada umumnya berada di luar cakupan periode piloting 2016-2020 yang menjadi batasan waktu penelitian ini.

6.2.2. Saran Praktis

Bagi Pemerintah Indonesia, hasil penelitian ini merekomendasikan agar program gizi remaja terus dilembagakan ke dalam kebijakan dan anggaran nasional maupun daerah secara berkelanjutan, tidak lagi bergantung pada dukungan eksternal. Pemerintah juga perlu memperkuat manajemen rantai pasok Tablet Tambah Darah (TTD), mengintegrasikan pendidikan gizi ke dalam kurikulum secara lebih efektif, serta memastikan komitmen pimpinan daerah dan kepala sekolah agar koordinasi lintas sektor tidak terhambat di tingkat provinsi dan kabupaten.

Bagi UNICEF dan organisasi mitra, disarankan untuk melanjutkan pendampingan teknis sembari mengalihkan fokus secara bertahap menuju penguatan kapasitas pemerintah, memperkuat pengembangan kapasitas guru dan fasilitator agar partisipasi remaja berjalan bermakna, serta memperluas cakupan program untuk menjangkau remaja di luar sistem persekolahan melalui kolaborasi dengan organisasi masyarakat, lembaga keagamaan, dan komunitas remaja. Adapun bagi pemangku kepentingan lainnya, seperti akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta, diharapkan dapat berperan aktif mendukung keberlanjutan program melalui penelitian, advokasi, maupun penyediaan sumber daya.